

**LAPORAN  
HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG  
KELAS II**



Triwulan IV

**TAHUN 2021**  
LEMBARAN PENGESAHAN

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II**

**Disahkan di Tamiang Layang  
Pada Hari Senin, 4 Januari 2022**

*Quality Managemen Representative*





Beny Sumarno, S.H.,M.H  
NIP. 19760829 200502 1 001

Koordinator Tim Survei



Rony Oktavianus, S.H.  
NIP. 19841009 200904 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II



Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.  
NIP. 19750503 200012 2 002

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	5
1.3. Landasan Hukum .....	5
1.4. Rencana Kerja .....	6
<b>BAB II</b> .....	8
<b>METODOLOGI</b> .....	8
2.1. Metode Penelitian .....	8
2.2. Populasi Dan Sampel .....	8
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	8
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	8
2.5. Teknik Analisis Data .....	9
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	9
<b>BAB III</b> .....	12
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	12
3.1. Profil responden .....	12
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	15
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	26
<b>BAB IV</b> .....	29
<b>PENUTUP</b> .....	29
4.1. Kesimpulan .....	29
4.2. Rekomendasi .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas .....	10
Tabel 2	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi .....	10
Tabel 3	Nilai persepsi .....	11
Tabel 4	Tingkat Pendidikan responden .....	12
Tabel 5	Jenis pekerjaan responden .....	14
Tabel 6	Usia responden .....	15
Tabel 7	Indikator manipulasi peraturan .....	16
Tabel 8	Indikator penyalahgunaan jabatan .....	17
Tabel 9	Indikator menjual pengaruh .....	18
Tabel 10	Indikator transparansi biaya .....	19
Tabel 11	Indikator transaksi rahasia .....	20
Tabel 12	Indikator tambahan biaya .....	21
Tabel 13	Indikator hadiah .....	22
Tabel 14	Indikator transaksi biaya .....	23
Tabel 15	Indikator percaloan .....	24
Tabel 16	Indikator perbuatan curang .....	25
Tabel 17	Indeks Persepsi Korupsi satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang .....	26
Tabel 18	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Pendidikan responden .....	13
Gambar 2	Jenis pekerjaan responden .....	14
Gambar 3	Usia responden .....	15
Gambar 4	Indikator manipulasi peraturan .....	16
Gambar 5	Indikator penyalahgunaan jabatan .....	17
Gambar 6	Indikator menjual pengaruh .....	18
Gambar 7	Indikator transparansi biaya .....	19
Gambar 8	Indikator transaksi rahasia .....	20
Gambar 9	Indikator tambahan biaya .....	21
Gambar 10	Indikator hadiah .....	22
Gambar 11	Indikator transaksi biaya .....	23
Gambar 12	Indikator percaloan .....	24
Gambar 13	Indikator perbuatan curang .....	25
Gambar 14	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah



disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Yaitu pengguna Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Tamiang Layang.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat,

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi oleh pengguna Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN

Tamiang Layang secara mandiri melalui *googleform* Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 50 responden.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur

penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transaksi biaya
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1,00 – 1,75	25 - 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan terakhir mayoritas responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah SLTA sebanyak 14 orang (66%); kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyak 3 orang (14%); SMP/SLTP sebanyak 2 orang (14%); dan Pasca Sarjana (S2/S3) sebanyak 0 orang (0%).

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

<b>No</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP/SLTP	2	10
4	SLTA	14	66
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	2	10
6	Sarjana (S1)	3	14
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

**Gambar 1.**  
**Tingkat pendidikan responden**



### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan, sebesar 21 responden (100%) pengguna layanan Pengadilan Negeri Tamiang Layang memiliki pekerjaan sebagai Swasta 15 orang (71%), PNS 5 orang (24%), Tenaga Kontrak 1 orang (5%).

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

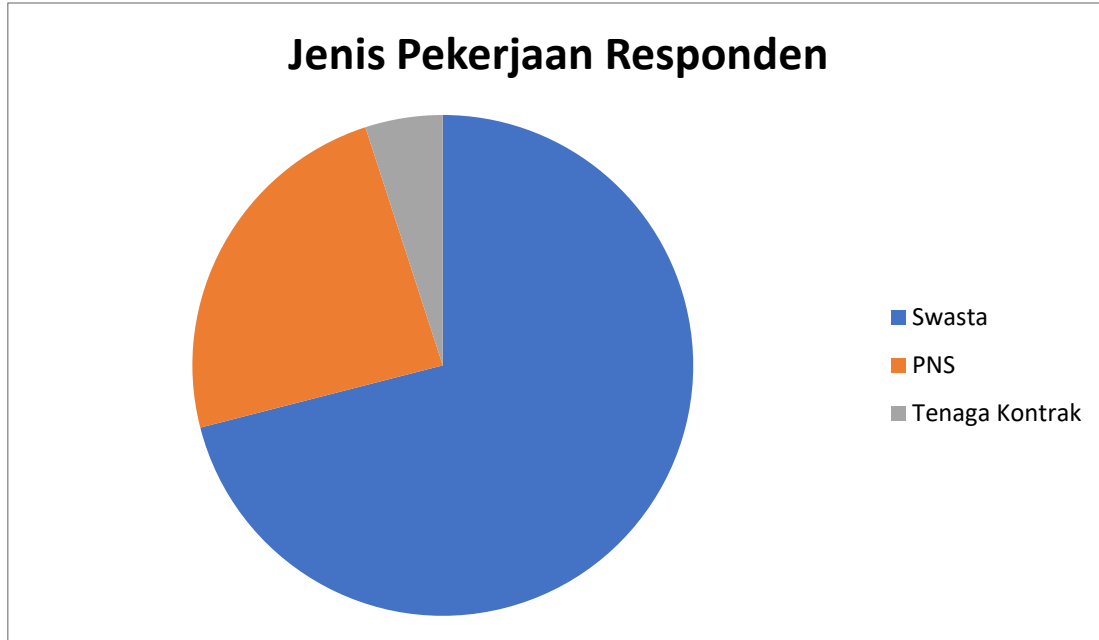
No	Pekerjaan Responden	Frekuensi	%
1	Swasta	15	71
2	PNS	5	24
3	Tenaga Kontrak	1	5
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini:

**Gambar 2.**

**Jenis pekerjaan responden**



**3.1.3. Kelompok usia responden**

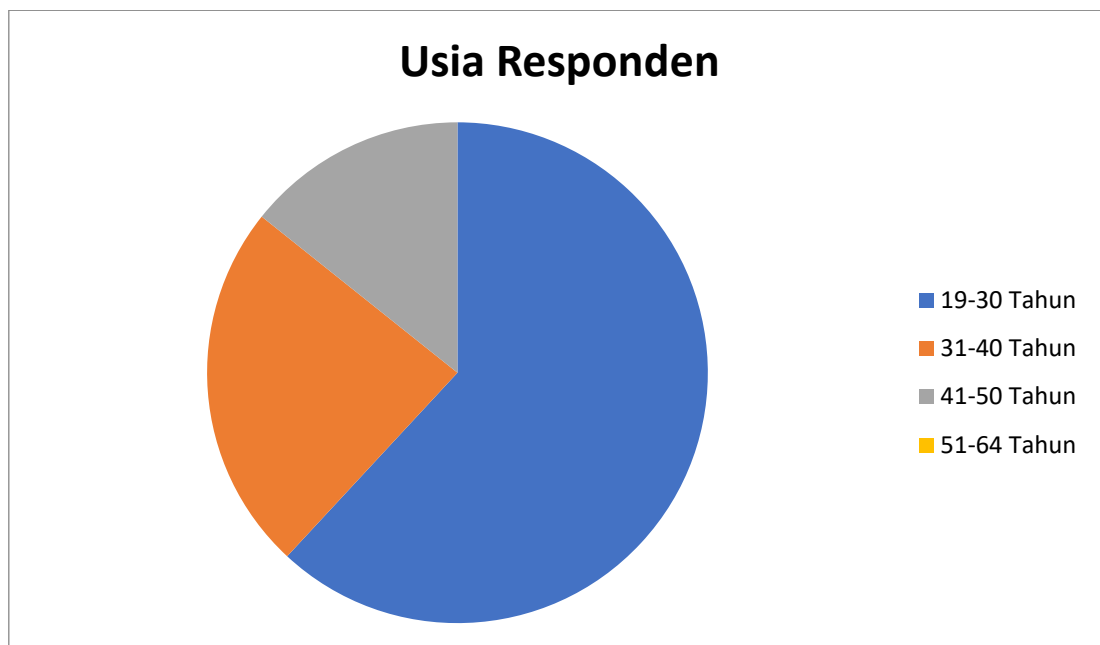
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan masuk dalam kelompok usia produktif. Dimana paling banyak terdapat pada kelompok usia 19 – 30 tahun sebanyak 13 orang (62%); kemudian diikuti usia 31 – 40 tahun sebanyak 5 orang (24%); usia 41 – 50 tahun sebanyak 3 orang (14%); dan 51 – 64 tahun sebanyak 0 orang (0%).



**Tabel 6.**  
**Usia responden**

No	Usia Responden	Frekuensi	%
1	19 – 30 Tahun	13	62
2	31 – 40 Tahun	5	24
3	41 – 50 Tahun	3	14
4	51 – 64 Tahun	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>100</b>

**Gambar 3.**  
**Usia responden**



### **3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator**

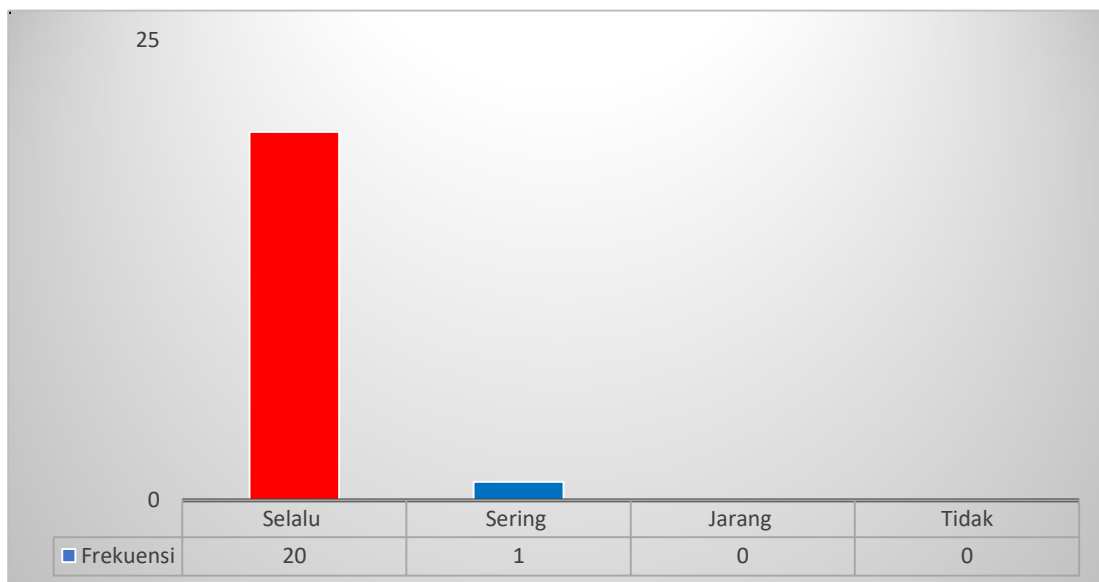
#### **3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,952. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari Manipulasi Peraturan.

**Tabel 7.**  
**Indikator manipulasi peraturan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu Sesuai	4	20	95
2	Sering Sesuai	3	1	5
3	Jarang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 4.**  
**Indikator manipulasi peraturan**



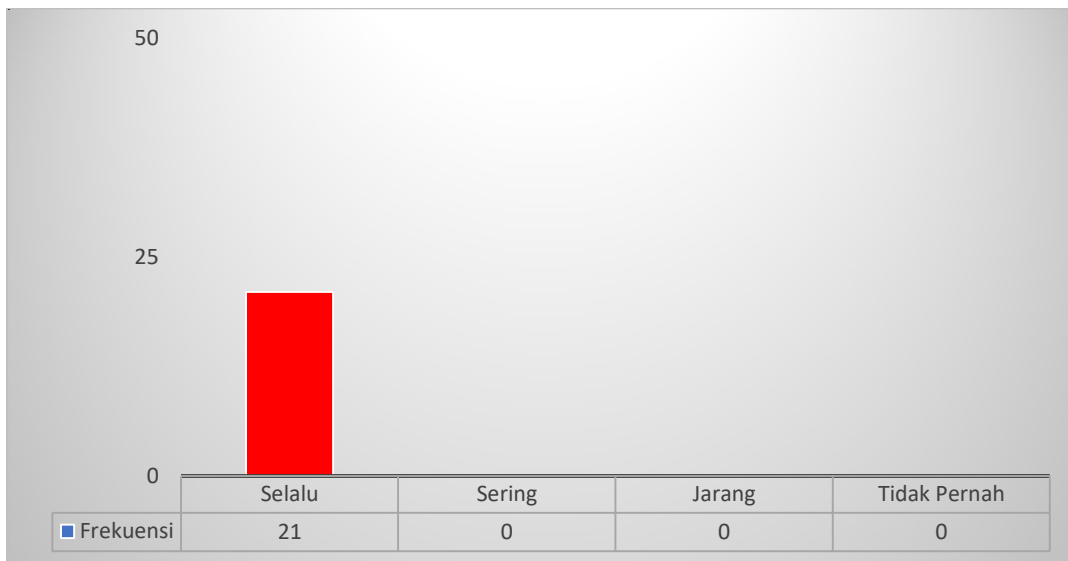
### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari Tindakan Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 8.**  
**Indikator penyalahgunaan jabatan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tanpa Meminta Imbalan	4	21	100
2	Jarang Meminta Imbalan	3	0	0
3	Sering Meminta Imbalan	2	0	0
4	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 5.**  
**Indikator penyalahgunaan jabatan**



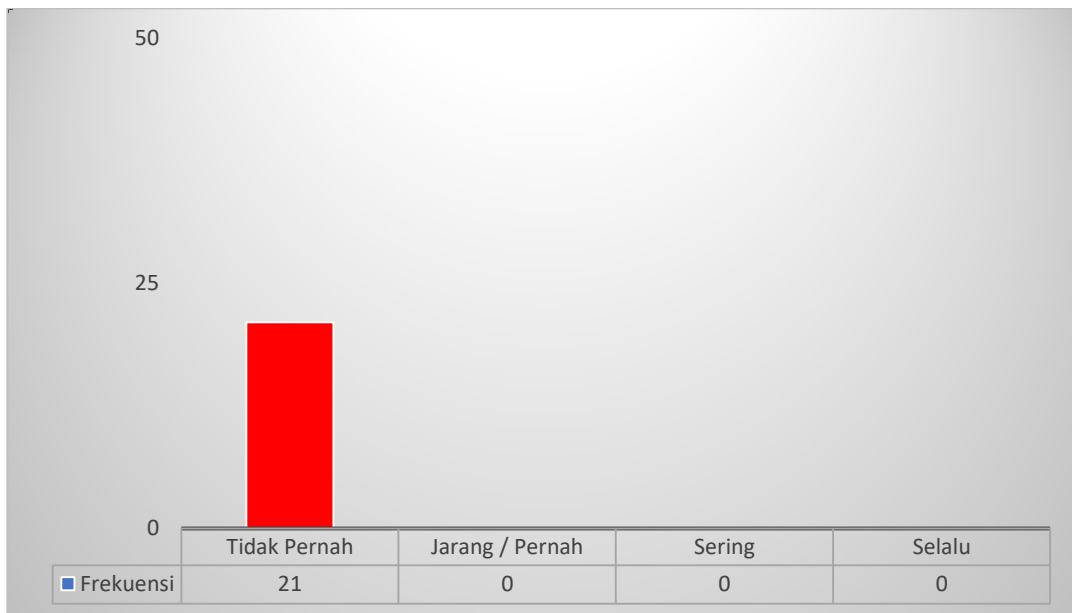
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari Tindakan Menjual Pengaruh

**Tabel 9.**  
**Indikator menjual pengaruh**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	21	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 6.**  
**Indikator menjual pengaruh**



**3.2.4. Indikator Transparansi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,476. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dalam Transparansi Biaya.

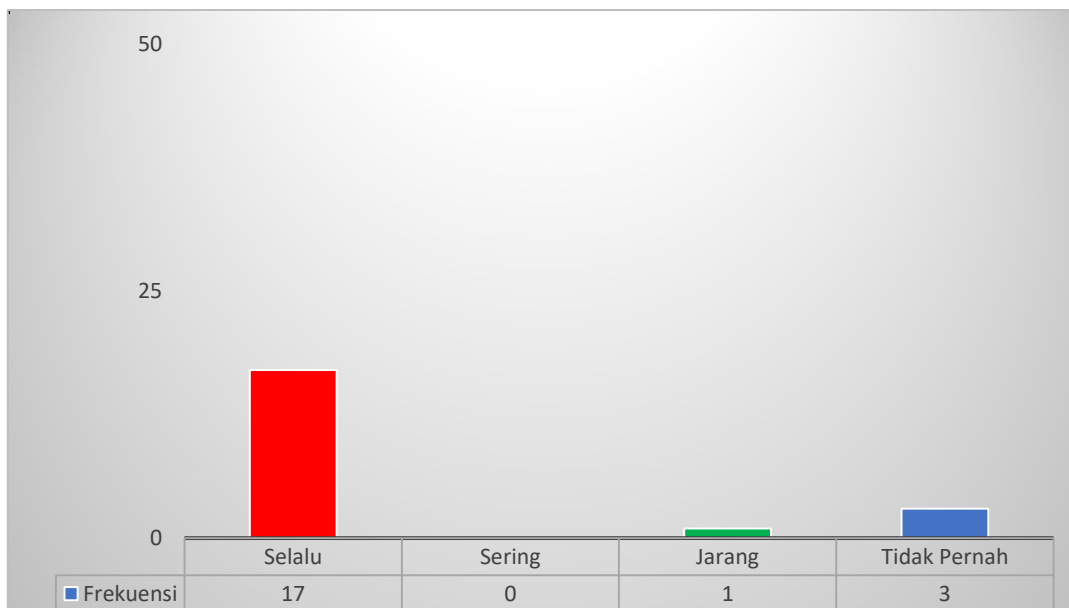
**Tabel 10.**

**Indikator transparansi biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	17	81
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	1	4
4	Tidak Pernah	1	3	15
Jumlah			21	100

**Gambar 7.**

**Indikator transparansi biaya**



**3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,190. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri

Tamiang Layang Bersih dari Tindakan Transaksi Rahasia.

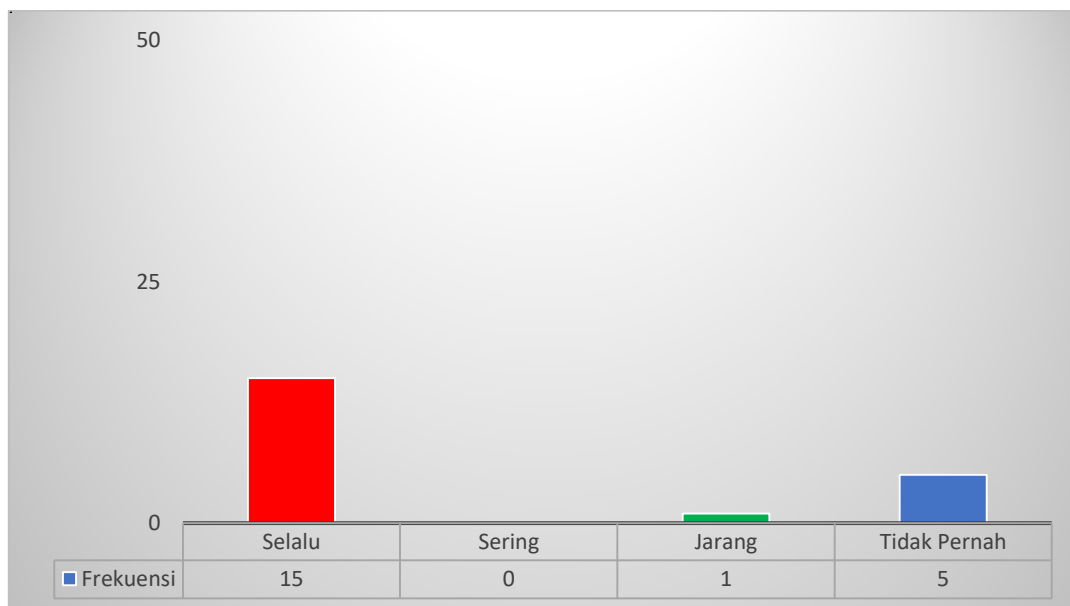
**Tabel 11.**

**Indikator transaksi rahasia**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	15	71
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	1	4
4	Tidak Pernah	1	5	25
Jumlah			21	100

**Gambar 8.**

**Indikator transaksi rahasia**



**3.2.6. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,571. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa

kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari Korupsi Biaya Tambahan.

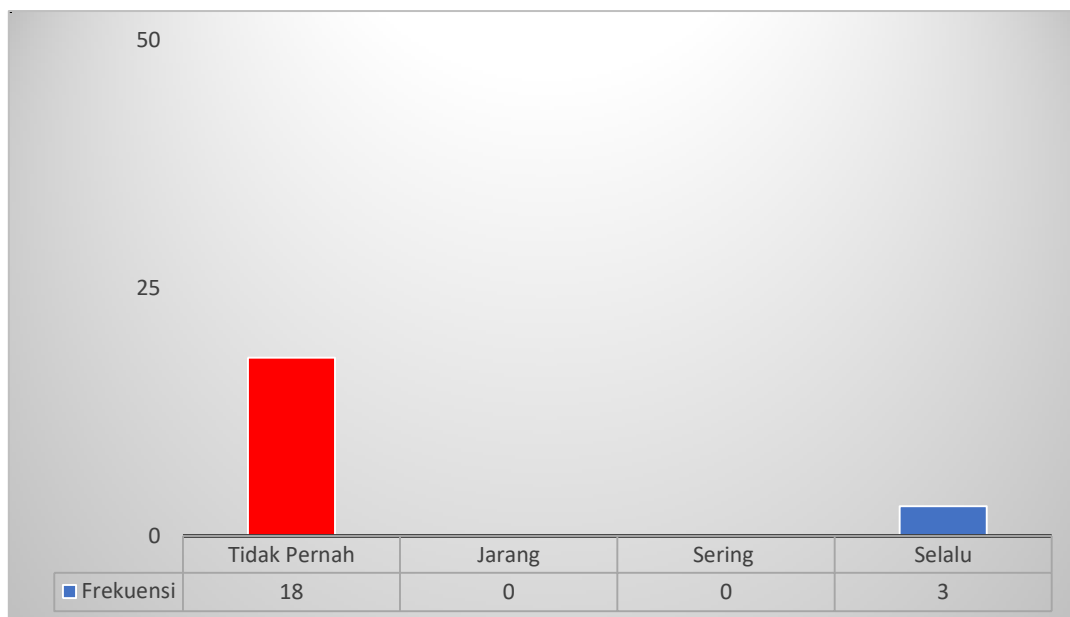
**Tabel 12.**

**Indikator tambahan biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	18	86
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	3	14
Jumlah			21	100

**Gambar 9.**

**Indikator tambahan biaya**



**3.2.7. Indikator Hadiah**

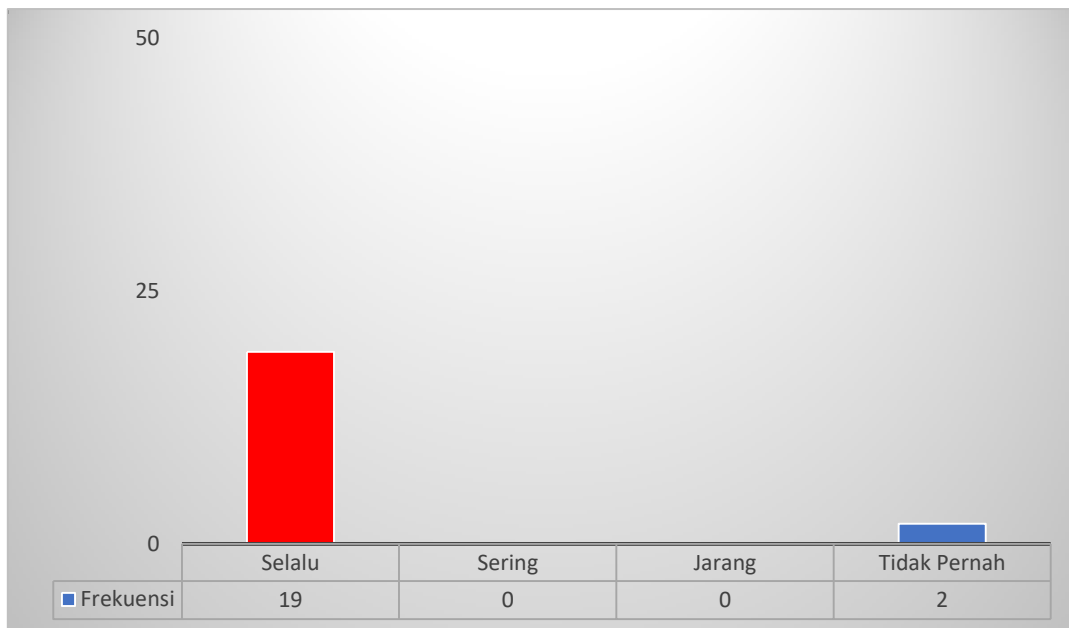
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,714. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari korupsi Hadiah.

**Tabel 13.**  
**Indikator hadiah**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	19	90
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	2	10
Jumlah			21	100

**Gambar 10.**  
**Indikator hadiah**



### 3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks tersebut



dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dalam Transaksi biaya.

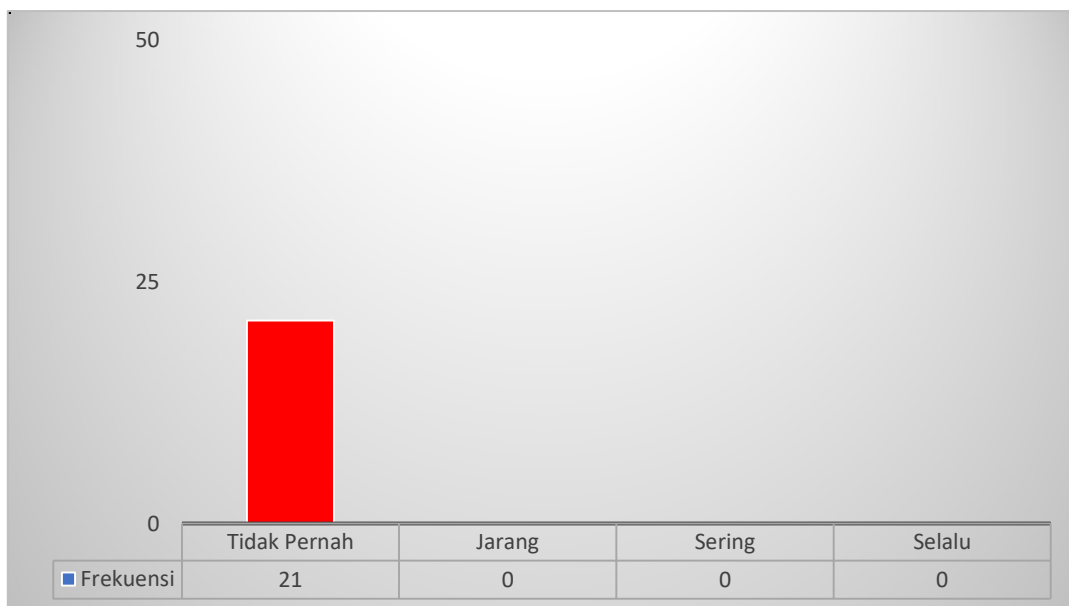
**Tabel 14.**

**Indikator transaksi biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	21	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 11.**

**Indikator transaksi biaya**



**3.2.9. Indikator Percaloan**

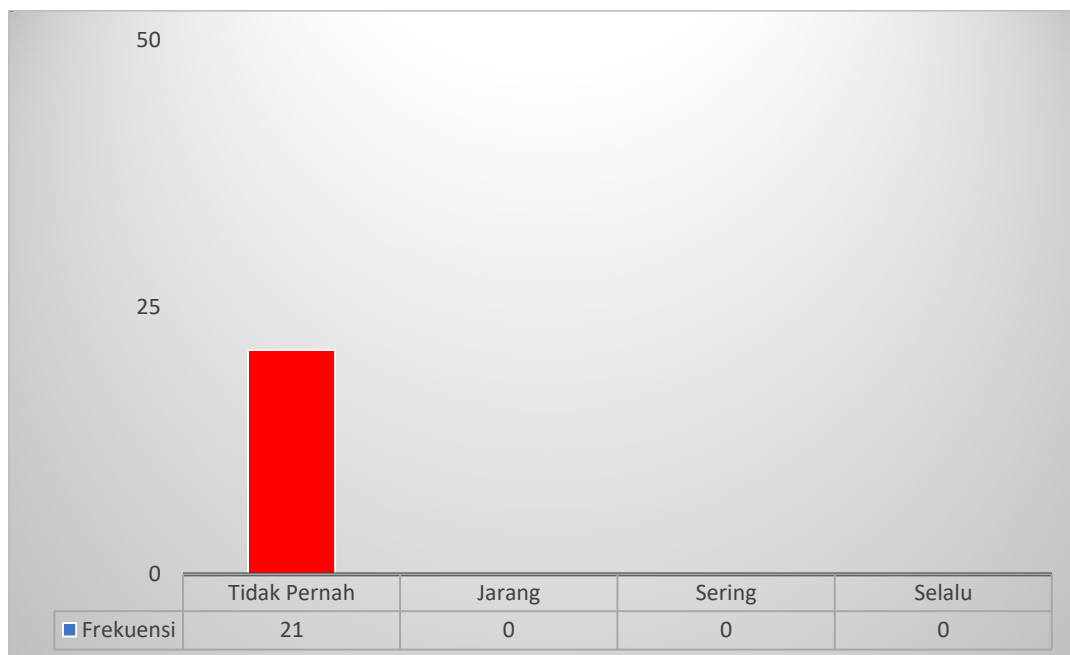
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja

Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 15.**  
**Indikator percaloan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	21	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 12.**  
**Indikator percaloan**



### 3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks tersebut dapat diartikan

bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Bersih dari Tindakan Perbuatan Curang.

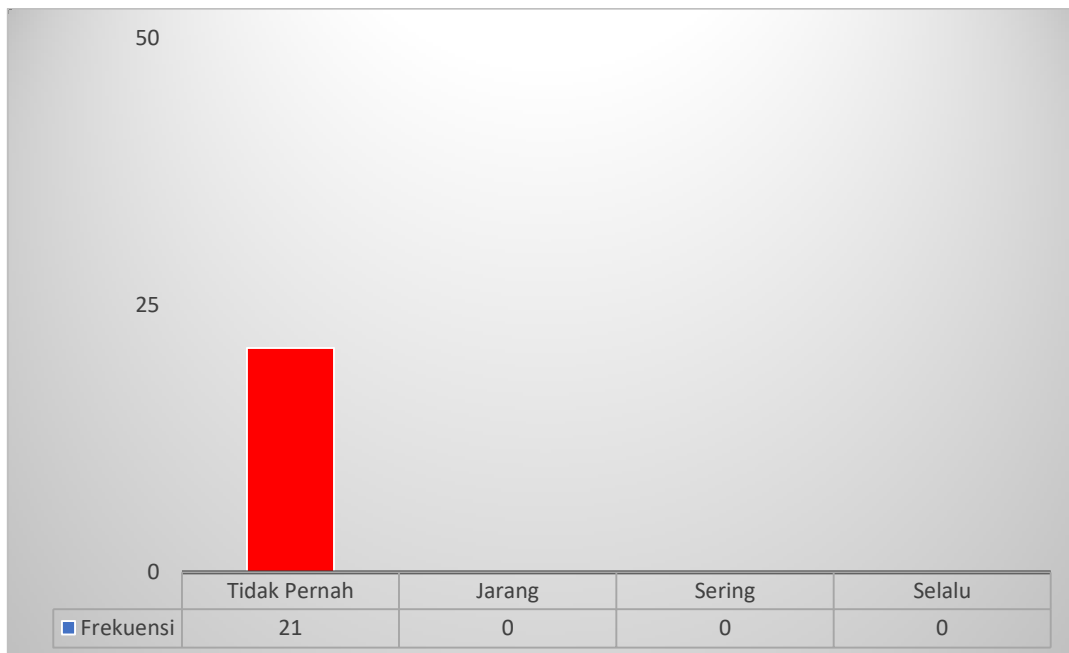
**Tabel 16.**

**Indikator perbuatan curang**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	21	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			21	100

**Gambar 13.**

**Indikator perbuatan curang**



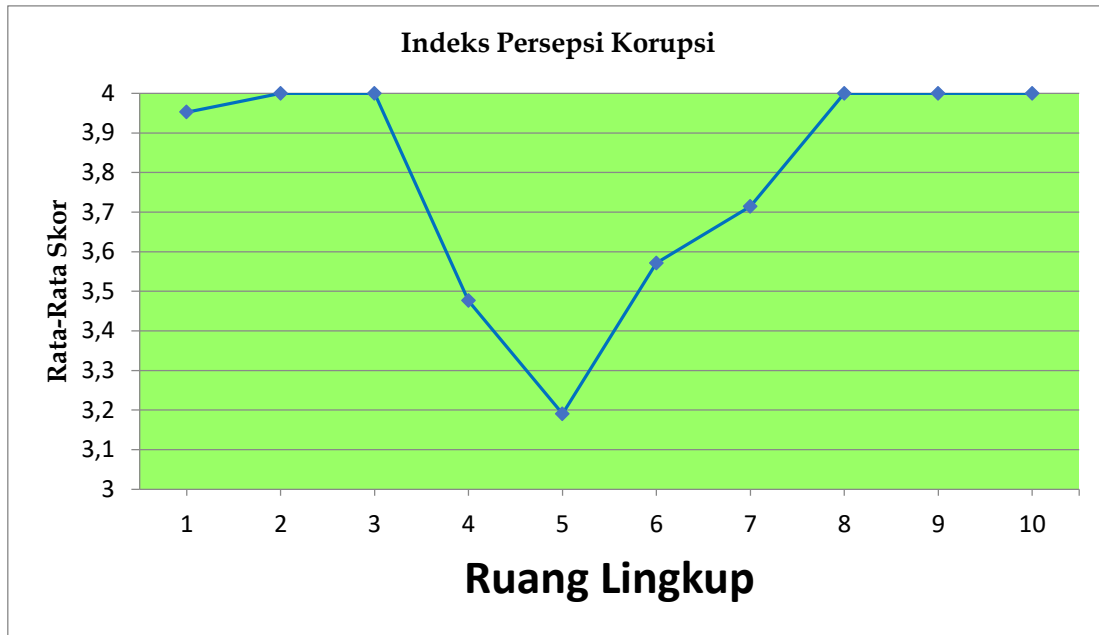
### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebesar 3,790.

**Tabel 17.**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang**

			<b>Indeks Persepsi Korupsi:</b>	
			<b>3,790</b>	<b>Kategori: BERSIH DARI KORUPSI</b>
<b>Nomor</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Peringkat</b>
1	Manipulasi Peraturan	3,952	Bersih dari Korupsi	<b>1</b>
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>2</b>
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>9</b>
4	Transparansi Biaya	3,476	Bersih dari Korupsi	<b>4</b>
5	Transaksi Rahasia	3,190	Cukup Bersih Dari Korupsi	<b>3</b>
6	Biaya Tambahan	3,571	Bersih dari Korupsi	<b>9</b>
7	Hadiah	3,714	Bersih dari Korupsi	<b>5</b>
8	Transparansi Pembayaran	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>8</b>
9	Percaloan	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>6</b>
10	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>7</b>

**Gambar 14.**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang**



Indeks 3,790 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 94,76.

**Tabel 18.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih

				dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,790 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,952
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,476
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,190
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,571
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,714
8. Indikator Transaksi biaya, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Triwulan IV Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,790 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Transaksi Rahasia memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

# LAMPIRAN



## Lampiran 1

### IDENTITAS RESPONDEN SURVEI PERSEPSI KORUPSI



**PENGADILAN NEGERI TAMIANG  
LAYANG**

JL. AHMAD YANI NO. 007 TAMIANG LAYANG

No. Resp	KUALIFIKASI IDENTITAS				Keterangan
	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	28	2	4	2	
2	24	1	4	4	
3	26	2	6	2	
4	28	1	6	4	
5	22	2	4	2	
6	22	2	4	2	
7	22	1	4	2	
8	41	1	4	4	
9	21	1	5	4	
10	24	2	4	2	
11	37	1	3	2	
12	39	1	4	2	
13	48	1	4	2	
14	28	1	6	4	
15	33	1	4	2	
16	30	1	4	2	
17	25	2	4	2	
18	25	2	4	2	
19	38	2	3	2	
20	47	2	5	3	
21	33	1	4	2	

#### Keterangan :

- 1 Umur
- 2 Jenis Kelamin
- 3 Pendidikan
- 4 Pekerjaan

## Lampiran 2

No. Resp	RUANG LINGKUP										Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4	
2	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	
Σ Nilai/Unsur	83	84	84	73	67	75	78	84	84	84	
NRR Unsur	3,952	4,000	4,000	3,476	3,190	3,571	3,714	4,000	4,000	4,000	
NRR Tertimbang/ Unsur	0,395	0,400	0,400	0,348	0,319	0,357	0,371	0,400	0,400	0,400	3,790
<b>IPK</b>											<b>94,76</b>

**Keterangan :**

**Q1 - Q10**

NRR

IPK

- \*)

- \*\*)

NRR Per Unsur

= Unsur-Unsur  
Pertanyaan

= Nilai rata-  
rata

= Indeks Persepsi  
Korupsi

= Jumlah NRR IPK tertimbang

= Jumlah NRR Tertimbang x 25

= Jumlah nilai per Unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

**IPK : 94,76**

**Kategori: BERSIH DARI KORUPSI**

**Mutu :**

1 (Tidak Bersih dari Korupsi)	: 25 - 43,75	1,00 – 1,75
2 (Kurang Bersih dari Korupsi)	: 43,76 - 62,50	1,76 – 2,50
3 (Cukup Bersih dari Korupsi)	: 62,51 - 81,25	2,51 – 3,25
4 (Bersih dari Korupsi)	: 81,26 - 100,00	3,26 – 4,00

**Tabel**  
**RINGKASAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI**

<b>Indeks Persepsi Korupsi:</b>	
<b>94,76</b>	<b>Kategori: BERSIH DARI KORUPSI</b>

<b>Nomor</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Peringkat</b>
1	Manipulasi Peraturan	3,952	Bersih dari Korupsi	6
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi	1
4	Transparansi Biaya	3,476	Bersih dari Korupsi	9
5	Transaksi Rahasia	3,190	Cukup Bersih Dari Korupsi	10

6	Biaya Tambahan	3,571	Bersih dari Korupsi	<b>8</b>
7	Hadiah	3,714	Bersih dari Korupsi	<b>7</b>
8	Transparansi Pembayaran	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>1</b>
9	Percaloan	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>1</b>
10	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi	<b>1</b>

**Lampiran 3**

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
TAHUN 2021**

**SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

\*Wajib



Nama (boleh inisial/tidak diisi)

Jawaban Anda

Alamat Email

Jawaban Anda

Instansi/Perusahaan

Jawaban Anda

Umur (Tahun) \*

Jawaban Anda

Jenis Kelamin \*

- Laki-Laki
- Perempuan

Pendidikan Terakhir \*

- Tidak Sekolah
- SD
- SMP/SLTP
- SMA/SMK
- Diploma (D1/D2/D3/D4)
- Sarjana (S1)
- Pasca Sarjana (S2/S3)

Pekerjaan Utama \*

- PNS
- TNI/Polri
- Pegawai Swasta
- Wiraswasta
- Petani/Nelayan
- Pedagang
-

Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu?(Manipulasi Peraturan) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan



Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?(Transaksi Biaya)

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?(Biaya Tambahan) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah) \*

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?(Transparasi Biaya) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?(Percaloan) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang) \*

- Selalu

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?(Transaksi Rahasia) \*

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah